

**KEABSAHAN AKTA PERJANJIAN DAN AKTA PELEPASAN HAK
ATAS TANAH TERKAIT PENGEMBANGAN PERUMAHAN
BTS DI TASIKMALAYA**

Oleh:

Aurelia Lakshita Suci H. *, Sudjito. **

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) keabsahan Akta Perjanjian dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah terkait pengembangan Perumahan BTS di Tasikmalaya dan (2) pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Perjanjian dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah terkait pengembangan Perumahan BTS di Tasikmalaya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder (kepastakaan) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan narasumber ahli dan studi dokumen. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Akta Perjanjian dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Notaris AW dapat dikatakan keduanya sah dan mengikat para pihak karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan telah memenuhi syarat materiil dan formil dalam pembuatan akta. Berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris dalam hal akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum, maka para pihak yang merasa dirugikan akibat dari kecacatan tersebut dapat meminta pertanggungjawaban kepada Notaris. Adapun sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris berdasarkan dari kelalaian yang telah dilakukannya, dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, hingga sanksi pidana.

Kata kunci: Keabsahan, Pertanggungjawaban, Notaris.

* Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
(aurelialakshita@mail.ugm.ac.id)

** Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
(Sudjito@mail.ugm.ac.id)

**VALIDITY OF THE DEED OF AGREEMENT AND DEED OF RELEASE
OF LAND RIGHTS RELATED TO THE DEVELOPMENT OF
BTS TASIKMALAYA HOUSING**

By:

Aurelia Lakshita Suci H. *, Sudjito. **

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze: (1) the validity of the Deed of Agreement and the Deed of Release of Land Rights related to the development of BTS Housing in Tasikmalaya and (2) the Notary's accountability for the Deed of Agreement and the Deed of Release of Land Rights related to the development of BTS Housing in Tasikmalaya.

This research uses a normative juridical research method, which is a study that uses primary and secondary data (literature) consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques involve field research, interviews with expert informants, and document studies. Data analysis is conducted using qualitative methods.

The results of this study indicate that both the Deed of Agreement and the Deed of Release of Land Rights made by Notary AW can be considered valid and binding on the parties involved because they have been executed in accordance with the provisions of Article 1868 of the Civil Code and have fulfilled both material and formal requirements in the drafting of the deeds. Regarding the responsibility of the Notary in the event that the deed contains legal defects, parties who feel aggrieved due to such defects can seek accountability from the Notary. Sanctions that can be imposed on the Notary based on the negligence committed may include administrative sanctions, civil sanctions, and even criminal sanctions.

Keywords: *Validity, Accountability, Notary.*

* Master Of Notary Student, Faculty of Law, Gadjah Mada University
(aurelialakshita@mail.ugm.ac.id)

** Master of Notary Lecturer, Faculty of Law, Gadjah Mada University (Sudjito@mail.ugm.ac.id)